

## **Pengaruh Kebijakan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Keuangan**

**Sitti Muliana**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara, Indonesia  
*muliana200785@gmail.com*

**Vebby Anwar**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana, Indonesia  
*vebbyanwar1512@gmail.com*

**Yusti suciati ardhana akhyar**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara, Indonesia  
*suciatiardhana55@gmail.com*

### **Abstract**

*This research aims to examine the influence of government policies and regulations through financial inclusion on the economic empowerment of women in creative industries specifically for women in South Sulawesi. This research is a type of quantitative research. To achieve the research objectives, explanatory analysis was used using the Structural Equation Modeling (SEM-PLS) analysis tool. This research used 126 samples. The research results show that increasing government regulations on women's economic empowerment, policies and incentives have an effect on increasing women's economic empowerment. The results of the structural model analysis show that financial inclusion has a positive and significant effect on women's economic empowerment.*

**Keywords:** *Women's economic empowerment, financial inclusion, creative industry.*

### **A. PENDAHULUAN**

Saat ini inklusi keuangan menjadi perhatian di banyak negara karena perannya dalam perkembangan ekonomi (Watanapongvanich et al., 2021). Fasilitas layanan keuangan bagi masyarakat dapat mendukung inklusi keuangan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara (Thathsarani et al., 2021). Secara global, inklusi keuangan telah dipercaya sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) (Demirgüç-Kunt et al., 2020). Olehnya itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan wajib memperhatikan serta mendorong peningkatan inklusi keuangan sebagai prioritas kebijakan utama (Hess et al., 2021), (Low & Fekete-Farkas, 2021). Penelitian (Hess et al., 2021) menyebutkan, terdapat kesenjangan antar gender dalam mengakses lembaga keuangan resmi di berbagai negara. Lebih khusus lagi, penelitian (Demirgüç-Kunt et al., 2020), (Siddik, 2017) melaporkan kesenjangan gender banyak terjadi di negara berkembang.

Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi sangatlah penting. Peran perempuan

mempunyai dampak yang luas tidak hanya dalam peningkatan perekonomian keluarga dan perekonomian nasional, namun juga dalam penciptaan lapangan kerja. Indonesia dalam Presidensi G20 melalui program W20 Sispreneur hadir untuk menciptakan ekonomi inklusif untuk memberdayakan womenpreneurs. Program ini dilakukan dengan memberikan kemudahan akses permodalan dan transformasi digital. Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi menyebabkan berkurangnya kasus kekerasan yang seringkali disebabkan oleh permasalahan ekonomi.

Inklusi keuangan adalah solusi dalam mengurangi kemiskinan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sumber daya keuangan untuk mendukung pelaku usaha (Arner et al., 2020), (Alenoghena et al., 2020). Oleh karena itu permasalahan kesetaraan gender dalam mengakses lembaga keuangan menjadi sangat penting. Untuk itu diperlukan dukungan pemerintah dalam upaya pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi perempuan hadir sebagai salah satu upaya untuk menuju kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Mempertimbangkan pentingnya inklusi keuangan bagi pemberdayaan perempuan maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan dan regulasi pemerintah baik secara langsung maupun melalui inklusi keuangan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan pada industri kreatif khas perempuan di provinsi Sulawesi selatan.

Saat ini ekonomi kreatif menjadi perhatian pemerintah. Ekonomi kreatif di Indonesia didominasi oleh tenaga kerja perempuan misalnya subsektor kuliner, fashion dan periklanan. Eksistensi perempuan di industri kreatif semakin meningkat ditengah isu marginalitas gender. Stigma sosial yang berkembang di masyarakat menyebabkan perempuan sering dipandang sebelah mata dan sulit bersaing mendapatkan pekerjaan. Bukan hanya itu, fakta tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian sering menyebabkan perempuan menjadi korban bahkan membuatnya hidup dalam kemiskinan atau menjadi *single parent*.

Penelitian sebelumnya telah membahas inklusi keuangan dari berbagai perspektif di seluruh dunia seperti (Tanti et al., 2021) dan (García Machado et al., 2020). Namun, masih terbatas penelitian yang mengaitkan isu kesenjangan gender dengan inklusi keuangan khususnya di Indonesia. Inklusi keuangan menjadi isu penting karena banyak masyarakat, terutama pengusaha perempuan belum mendapatkan akses layanan keuangan dasar melalui lembaga keuangan formal. Penelitian yang mengkaji bagaimana kebijakan dan regulasi pemerintah melalui inklusi keuangan mempengaruhi pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya industri kreatif belum banyak ditemukan dari sekian banyak literatur yang ada. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kesenjangan ini.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Institutional theory**

Kerangka teori institusional telah digunakan oleh sebagian besar penelitian sebelumnya melalui pendekatan ekonomi untuk menjelaskan inklusi keuangan misalnya, (Caskey, 1997), (Barr & Sherraden, 2005) dan (Ostrom, 2009). Penelitian ini didasarkan pada teori institusional. Menurut (Buckland, 2012), teori institusional memberikan gambaran dengan baik tentang struktur dan proses yang berakar pada organisasi, kebijakan dan pasar. Melalui pendekatan ini, diperoleh pemahaman yang lebih detail tentang inklusi keuangan melalui peran kelembagaan. Pada dasarnya, teori institusional berupaya untuk menggambarkan aspek yang lebih dalam bagaimana institusi diciptakan, dipelihara dan diubah (Scott, 2005). Dalam konteks penelitian ini, penelitian ini membahas pengaruh kebijakan dan regulasi pemerintah terhadap inklusi keuangan serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang menjadi struktur (peraturan atau regulasi) yang memandu perilaku sosial sehingga membentuk inklusi keuangan dan mendorong pemberdayaan ekonomi.

### **Kebijakan pemerintah dan Inklusi keuangan**

Konsep inklusi keuangan telah menjadi isu utama dalam agenda pembangunan di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia (Ratnawati, 2020). Menurut PBB, inklusi keuangan mengacu pada kemudahan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat (Ren et al., 2023). Inklusi keuangan juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan layanan keuangan formal oleh masyarakat (Hess et al., 2021), (Panda, 2018). Inklusi keuangan menurut (Efobi et al., 2014), (Chauvet & Jacolin, 2017) didefinisikan sebagai peningkatan akses terhadap jasa keuangan formal yang diukur dengan kepemilikan rekening, penggunaan kredit dan tabungan di bank.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha dilakukan OJK dengan menerbitkan POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat (POJK 76 Tahun 2016). Peraturan tersebut diterbitkan juga untuk memperkuat komitmen, kesadaran, dan tanggung jawab untuk memberi layanan serta berinteraksi langsung dengan Konsumen untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi Konsumen dan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

### **Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan**

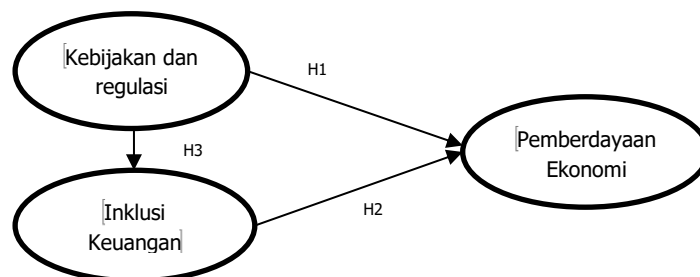
Berkembangnya industri kecil dan kreatif saat ini berdampak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional (Djaya, 2020). Industri kreatif adalah konsep ekonomi yang mengintensifkan informasi serta kreatifitas dengan mengandalkan ide serta *stock of knowledge* dari sumber daya

manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi (Sugiarto, 2019). Saat ini pelaku industri kreatif banyak melibatkan perempuan. Secara global, perempuan pengusaha telah menarik banyak perhatian karena kemampuan mereka menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dan orang lain, mengentaskan kemiskinan ekonomi (Tanti et al., 2021).

Inklusi keuangan menjadi perhatian karena dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan perempuan (Fareed et al., 2017). Pemberdayaan perempuan merupakan komponen penting dari kemajuan dan pembangunan. Kemajuan suatu negara melalui pembangunan gender memerlukan peningkatan akses Lembaga keuangan formal (García Machado et al., 2020). Perempuan sering menghadapi ketidakadilan dan kerentanan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan hukum. Untuk memerangi basis gender yang diciptakan secara sosial, perempuan perlu diberdayakan dalam semua aspek kehidupan (Shkodra et al., 2021). Kebijakan peningkatan inklusi keuangan untuk memberdayakan perempuan dilakukan dengan memastikan stabilitas keuangan perempuan (Mulili, 2020), (Nguse et al., 2022).

Demirgüç-Kunt et al., (2015) menemukan bahwa faktor *gender* turut memengaruhi inklusivitas keuangan dimana laki-laki memiliki akses ke layanan keuangan lebih baik dibandingkan perempuan di India. Sementara di Afrika, pengusaha pria yang lebih mapan, lebih terdidik, dan berpengalaman dengan akses keuangan yang lebih baik. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka diajukan hipotesis berikut.

- H1: Kebijakan dan regulasi pemerintah berpengaruh positif terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan.
- H2: Inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan.
- H3: Kebijakan dan regulasi pemerintah berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inklusi keuangan.



**Gambar 1. Model penelitian**

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan analisis eksplanatori dengan alat analisis *structural equation modelling* (SEM-PLS). Objek penelitian adalah pelaku industri kreatif khas perempuan di provinsi Sulawesi selatan seperti

busana fashion, periklanan, kuliner dan jenis industri kreatif lainnya. Data diperoleh sebanyak 126 data dari perempuan pelaku usaha industri kreatif khas perempuan. Jumlah ini telah melebihi 100-200 sampel seperti yang direkomendasikan (Hair et al., 2019). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel acak (*simple random sampling*). Instrumen penelitian menggunakan kuisioner yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya dan memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Variabel dan indikator diukur menggunakan skala likert 5 poin, menggunakan kombinasi pertanyaan positif dan negatif. Variabel dan indikator disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 1. Variabel penelitian**

Variabel	Indikator	Sumber
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Mampu menghadapi keadaan darurat	(Siddik, 2017)
	Mempromosikan tabungan dan investasi	
	Meningkatkan sumber pendapatan	
	Standar hidup yang lebih baik	
	Meningkatkan fasilitas medis yang lebih baik	
	Peningkatan posisi dalam keluarga	
Kebijakan dan regulasi pemerintah	Meningkatkan produktivitas	(Nguse et al., 2022)
	Kurangnya dukungan pemerintah yang memadai	
	Kurangnya regulasi yang tepat	
Inklusi keuangan	Lembaga keuangan enggan memberikan pembiayaan jangka panjang	(Panda, 2018)
	Kurangnya keamanan agunan	
	Suku bunga tinggi	
	Kurangnya keterampilan teknis	
	Prosedur birokrasi lembaga keuangan	

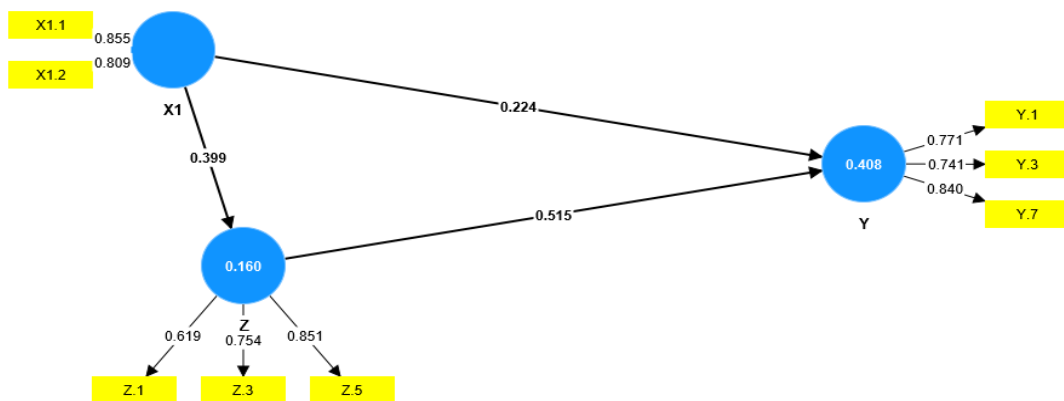
Hipotesis diuji menggunakan analisis data kuantitatif dengan alat analisis *partial least squares structural equation modeling* (PLS-SEM). Tahapan analisis yaitu evaluasi model pengukuran (*measurement model*) dan evaluasi model struktural (*structural model*). Evaluasi model pengukuran dilakukan dengan memeriksa *loading factor* (LF), *composite reliability*, *average variance extracted* (AVE), validitas diskriminan dan *cross loading*. Sedangkan evaluasi model struktural dilakukan dengan memeriksa R<sup>2</sup> dan Estimasi koefisien jalur (*T-value*).

Nilai validitas konvergen diperiksa dengan melihat nilai *loading factor* tiap item dengan syarat >0,6 (Hair et al., 2019). Sedangkan uji validitas konvergen mensyaratkan nilai AVE >0,5 dan nilai reliabilitas CR >0,7 (Hair et al., 2019). Selanjutnya validitas diskriminan diperiksa untuk menguji apakah faktor-faktor lainnya tidak memiliki korelasi. Nilai akar kuadrat dari AVE harus > nilai korelasi antar variabel laten. Kemudian dilakukan evaluasi model struktural melalui nilai R<sup>2</sup> untuk memeriksa bahwa model baik, moderat atau lemah. Terakhir estimasi koefisien jalur diperiksa dengan melihat hasil *bootstrapping* yang menunjukkan nilai (*T-value*).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Model Pengukuran

Penelitian ini menggunakan outer model untuk menguji hubungan antara variabel laten dan ukurannya. Item-item yang mengukur inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi perempuan, kebijakan dan regulasi pemerintah diberi kode terbalik untuk menjadikannya positif sebelum dianalisis sehingga semua item dari semua faktor berada pada arah yang sama (positif) pada saat pemodelan jalur. Hasil pengujian dari ukuran-ukuran konstruk menunjukkan keterkaitan yang tinggi dengan konstruk karena semuanya mempunyai nilai loading faktor lebih besar dari 0,60 (Hair et al., 2019). Ukuran konstruk dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Evaluasi model pengukuran

Selanjutnya, komponen pertama dari model pengukuran berupa analisis reliabilitas, dilakukan dengan reliabilitas komposit dan *Cronbach alpha*. Sejalan dengan tolok ukur (Hair et al., 2019), titik potong untuk reliabilitas komposit dan alfa Cronbach seharusnya lebih besar dari 0,70 dan 0,50. Oleh karena itu, hasil uji analisis reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel mempunyai hasil uji yang lebih besar. Komponen kedua dari model pengukuran (validitas konvergen) dilakukan dan ditemukan validitas data dengan nilai rata-rata varians yang diekstraksi (AVE) lebih besar dari 0,50 (Hair et al., 2019) (Tabel 2).

Tabel 2. Analisis reliabilitas dan validitas konvergen

Konstruk	Outer loading	Alpha	CR	AVE
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Y)				
Y.1	0.771	0.688	0.828	0.616
Y.3	0.741			
Y.7	0.840			
Kebijakan dan regulasi pemerintah (X)				
X1	0.855			

X2	0.809	0.558	0.818	0.693
Inklusi keuangan (Z)				
Z.1	0.619			
Z.3	0.754	0.647	0.789	0.559
Z.5	0.851			

Sumber: Data Penelitian, 2023

Selain itu, validitas diskriminan dilakukan melalui *Discriminant analysis validity (Fornell-Lacker criterion)*. Dalam hal ini, jika nilai AVE kuadrat lebih tinggi dari korelasi antara konstruk maka tidak terjadi masalah validitas data (Tabel 3).

**Tabel 3. Discriminant analysis validity (Fornell-Lacker criterion)**

	X1	Y	Z
X1	0.832		
Y	0.430	0.785	
Z	0.399	0.605	0.747

Sumber: Data Penelitian, 2023

### Analisis Model Struktural

Penelitian ini menggunakan penilaian model struktural untuk menguji hubungan antar variabel yang diajukan. Dalam hal ini, dilakukan uji pengaruh tidak langsung (pengaruh kebijakan dan insentif pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inklusi keuangan sebagai variabel mediasi) dan pengaruh langsung (pengaruh inklusi keuangan dan kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan). Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.

**Tabel 4. Uji Hipotesis**

Hipotesis	Direct	SD	T-statistic	P-value	Keputusan
H1: X1-Y	0.224	0.083	2.693	0.007	Diterima
H2: Z-Y	0.515	0.068	7.591	0.000	Diterima

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hipotesis, H1 mengevaluasi apakah kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan. Hasil analisis model struktural menunjukkan bahwa kebijakan dan insentif pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Koefisien jalur ( $\beta = 0.224$ ,  $t - statistics = 2.693$ ,  $p - value = 0.007$ ) mengandung arti bahwa kebijakan dan insentif pemerintah berpengaruh langsung terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku Industri Kreatif Khas Perempuan secara positif dan signifikan. Hasil ini membuktikan peningkatan peraturan pemerintah mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan, kebijakan, dan insentif menyebabkan pemberdayaan ekonomi perempuan meningkat sebesar 22,4%. Berdasarkan hasil tersebut maka

hipotesis H1 diterima. Hasil ini mendukung teori institusional yang menjelaskan pengaruh kebijakan didalam institusi dalam hal ini kebijakan dan regulasi pemerintah berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi. Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Nguse et al., 2022), (Fareed et al., 2017) dan (Siddik, 2017).

Lebih lanjut, H2 penelitian ini mengevaluasi apakah inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan. Hasil analisis model struktural menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan dengan koefisien jalur ( $\beta = 0.515$ ,  $t - statistics = 7.591$ ,  $p - value < 0.000$ ). Hasilnya berarti peningkatan inklusi keuangan akan menyebabkan pemberdayaan ekonomi perempuan meningkat sebesar 51,5%. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Mulili, 2020), (Nguse et al., 2022), (Fareed et al., 2017), (García Machado et al., 2020). Hasil ini juga membuktikan teori institusional, seperti yang dikemukakan (Scott, 2005) bahwa pengaruh institusi dapat memandu perilaku sosial sehingga membentuk inklusi keuangan serta menciptakan pemberdayaan ekonomi.

#### Analisis mediasi

Studi ini juga menguji apakah inklusi keuangan memiliki peran mediasi pada pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan H3. Hasil pengujian ditampilkan pada tabel 5.

**Tabel 5. Analisis Mediasi**

Hipotesis	Direct	SD	T-statistic	P-value	Keputusan
H3: X1-Z-Y	0.206	0.041	4.963	0.000	Diterima

Sumber: Data Penelitian, 2023

Hasil analisis model struktural menunjukkan bahwa inklusi keuangan mempunyai peran mediasi yang positif dan signifikan dengan jalur *coefficient* ( $\beta = 0.206$ ,  $t - statistics = 4.963$ ,  $p - value = 0.000$ ). Artinya kebijakan dan peraturan pemerintah mempengaruhi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inklusi keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh kebijakan dan peraturan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan bersifat langsung dan tidak langsung (Tabel 5). Hasil ini membuktikan bahwa inklusi sosial dapat menjadi mediasi yang mendukung peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku industri kreatif.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menguji pengaruh kebijakan dan peraturan pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inklusi keuangan. Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penentu inklusi keuangan pada tingkat



makro dan mikro. Akan tetapi, melihat bagaimana kebijakan dan peraturan pemerintah dalam kerangka inklusi keuangan mempengaruhi pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan hal yang sangat penting, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan akses terhadap keuangan berbasis gender. Penelitian ini menemukan adanya pengaruh langsung antara kebijakan dan peraturan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengaruh tidak langsung antara kebijakan dan peraturan pemerintah dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Hasil ini berarti peningkatan kebijakan, peraturan, dan insentif pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dapat meningkatkan pemberdayaan pelaku wirausaha perempuan industri kreatif di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa kebijakan dan peraturan pemerintah lebih bermanfaat bagi perempuan pengusaha industri kreatif jika melalui inklusi keuangan.

Lebih khusus lagi, inklusi keuangan juga ditemukan berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang mengarah pada peningkatan inklusi keuangan berperan penting dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan. Kemampuan perempuan untuk *survive* jika menghadapi masalah bahkan dalam keadaan darurat. Meningkatkan pendapatan dan produktivitas perempuan pelaku industri kreatif adalah indikator utama pemberdayaan ekonomi. Untuk menjamin hal tersebut pemerintah wajib mendukung melalui kebijakan dan regulasi, khususnya peningkatan inklusi keuangan seperti kemudahan akses kepada lembaga keuangan, suku bunga pinjaman yang rendah, dan birokrasi serta prosedur pembiayaan yang mudah.

## E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) yang telah memberikan biaya hibah penelitian sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Lembaga Layanan Dikti Wilayah IX Sulawesi dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara atas segala bantuannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alenoghena, R. O., Saibu, O. M., & Adeoye, B. W. (2020). Financial development and economic growth in Nigeria: asymmetric cointegration and threshold analysis. *Forum Scientiae Oeconomia*, 8(4), 43–63.
- Arner, D. W., Buckley, R. P., Zetzsche, D. A., & Veidt, R. (2020). Sustainability, FinTech and

- financial inclusion. *European Business Organization Law Review*, 21, 7–35.
- Barr, M. S., & Sherraden, M. W. (2005). *Institutions and inclusion in saving policy*.
- Buckland, J. (2012). *Hard choices: Financial exclusion, fringe banks, and poverty in urban Canada*. University of Toronto Press.
- Caskey, J. P. (1997). *Lower income Americans, higher cost financial services*.
- Chauvet, L., & Jacolin, L. (2017). Financial inclusion, bank concentration, and firm performance. *World Development*, 97, 1–13.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L. F., Singer, D., & Van Oudheusden, P. (2015). The global index database 2014: Measuring financial inclusion around the world. *World Bank Policy Research Working Paper*, 7255.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2020). The Global Index Database 2017: Measuring financial inclusion and opportunities to expand access to and use of financial services. *The World Bank Economic Review*, 34(Supplement\_1), S2–S8.
- Djaya, F. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 98–111.
- Efobi, U., Beecroft, I., & Osabuohien, E. (2014). Access to and use of bank services in Nigeria: Micro-econometric evidence. *Review of Development Finance*, 4(2), 104–114.
- Fareed, F., Gabriel, M., Lenain, P., & Reynaud, J. (2017). Financial inclusion and women entrepreneurship: Evidence from Mexico. *OECD Economic Department*.
- García Machado, J. J., Barbadilla Martín, E., & Gutiérrez Rengel, C. (2020). A PLS multigroup analysis of the role of businesswomen in the tourism sector in Andalusia. *Forum Scientiae Oeconomia*.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24.
- Hess, J., Klapper, L., & Beegle, K. (2021). *Financial inclusion, women, and building back better*.
- Low, D., & Fekete-Farkas, M. (2021). The demand for life insurance in a developing country and the mediating role of persuasion. *Journal of International Studies*, 14(3).
- Mulili, B. M. (2020). Financial Inclusion as a Tool for Women’s Economic Empowerment in Africa: Achieving UN’s 2030 SDG. *Empowering African Women for Sustainable Development: Toward Achieving the United Nations’ 2030 Goals*, 133–143.
- Nguse, T., Desalegn, G., Oshora, B., Tangl, A., Nathan, R. J., & Fekete-Farkasne, M. (2022). Enhancing Women Economic Empowerment Through Financial Inclusion: Evidence From Smes in Ethiopia. *Polish Journal of Management Studies*, 25(1), 270–291.
- Ostrom, E. (2009). *Understanding institutional diversity*. Princeton university press.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat*. Www.Ojk.Go.Id. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di->

Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-Masyarakat.aspx

- Panda, S. (2018). Constraints faced by women entrepreneurs in developing countries: review and ranking. *Gender in Management: An International Journal*.
- Ratnawati, K. (2020). The influence of financial inclusion on MSMEs' performance through financial intermediation and access to capital. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 205–218.
- Ren, K., Wang, Y., & Liu, L. (2023). Impact of Traditional and Digital Financial Inclusion on Enterprise Innovation: Evidence from China. *SAGE Open*, 13(1), 21582440221148096.
- Scott, W. R. (2005). Institutional theory: Contributing to a theoretical research program. *Great Minds in Management: The Process of Theory Development*, 37(2), 460–484.
- Shkodra, J., Ymeri, P., & Ibishi, L. (2021). Role of microfinance institutions for developing women entrepreneurship-the case study of Kosovo. *Economics & Sociology*, 14(1), 120–129.
- Siddik, M. N. A. (2017). The does financial inclusion promote women empowerment? Evidence from Bangladesh. *Applied Economics and Finance*, 4(4), 169–177.
- Sugiarto, E. . (2019). *Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia*. www.setneg.go.id
- Tanti, D. S., Nathan, R. J., Sulisty, P. B., Hanim, F., & Sarjuni, V. (2021). Empowering cross-border women entrepreneurs via mobile ict: Framework for malaysian and indonesian women-led msme. *Journal of Nusantara Studies (JONUS)*, 6(2), 340–357.
- Thathsarani, U. S., Wei, J., & Samaraweera, G. (2021). Financial inclusion's role in economic growth and human capital in South Asia: An econometric approach. *Sustainability*, 13(8), 4303.
- Watanapongvanich, S., Binnagan, P., Putthinun, P., Khan, M. S. R., & Kadoya, Y. (2021). Financial literacy and gambling behavior: evidence from Japan. *Journal of Gambling Studies*, 37, 445–465.